

## **OPTIMALISASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) UNTUK MENINGKATKAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA (Studi pada Lembaga Pertahanan Negara Wilayah Jawa Barat)**

**Dhea Perdana Coenraad**  
**STIE Pasundan, Bandung.**  
**Email: dhea@stiepas.ac.id**

### ***Abstract***

*This study aims to see the effectiveness of the use of the electronic procurement system (SPSE) in one of the state defense institutions in the West Java region. In this study, the samples were members of the state defense agency in the resource section. The sampling technique in this study used Probability Sampling with the cluster sampling method. The sampling technique in this study was to use Probability Sampling with the cluster sampling method. It is collecting data using interview and documentation techniques with the analysis technique using the SWOT analysis technique. This study indicates that the use of the Electronic Procurement System in a state defense institution in the West Java region is still not optimal, including due to inadequate human resource factors so that in its implementation, this SPSE does not use optimally. The lack of knowledge of human resources makes optimization from SPSE this is weak.*

***Keywords: electronic procurement system, procurement of facilities and infrastructure.***

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana efektifitas dari pemanfaatan system pengadaan secara elektronik (SPSE) yang ada di salah satu Lembaga pertahanan negara di wilayah jawa barat. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah anggota dari Lembaga pertahanan negara yang berada pada bagian sumberdaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Probability Sampling dengan metode Cluster sampling Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan Probability Sampling dengan metode Cluster sampling. Pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi dengan Teknik Analisa menggunakan Teknik Analisa SWOT. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di satu Lembaga pertahanan negara di wilayah jawa barat ini masih belum optimal diantaranya adalah karena faktor sumber daya manusia yang belum memadai sehingga dalam pelaksanaannya SPSE ini tidak dimanfaatkan secara optimal dan kurangnya pengetahuan SDM menjadikan optimalisasi dari SPSE ini lemah.

**Kata kunci:** sistem pengadaan secara elektronik, pengadaan sarana dan prasarana.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini membuat suatu perubahan yang sangat besar khususnya dalam hal transparansi di berbagai bidang sehingga mendorong setiap organisasi untuk terus berbenah dan mampu menciptakan akuntabilitas publik yang tinggi. (Halachmi & Greiling, 2013) Hal ini tidak terkecuali pada lembaga negara termasuk Lembaga Pertahanan Negara sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lembaga Pertahanan Negara pun berusaha menciptakan akuntabilitas publik yang baik dan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut.

Salah satu bentuk transparansi atau keterbukaan yang paling disorot oleh publik adalah akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa hal ini dikarenakan banyak sekali kasus pelanggaran yang terjadi selama pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sehingga sorotan publik terhadap proses pengadaan ini menjadi begitu besar.

Konsep akuntabilitas itu sendiri merujuk pada nilai-nilai efisiensi, efektifitas, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel (Lyrio, Lunkes & Taliani, 2018) sehingga dapat dikatakan akuntabilitas adalah suatu bentuk nyata tanggung jawab aparatur negara dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan amanah yang tertuang dalam undang-undang. Akuntabilitas ini pada hakikatnya dimunculkan karena kerap kali dijumpai banyak hal-hal yang tidak sesuai dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga merugikan sebelah pihak yang pada akhirnya menjatuhkan kredibilitas lembaga negara itu sendiri. (Brown & Toze, 2017) Berawal dari kondisi itulah akuntabilitas saat ini menjadi sesuatu yang penting dan tidak bisa dipisahkan dalam pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan barang dan jasa di lembaga negara seperti Lembaga Pertahanan Negara .

Salah satu harapan dilaksanakannya akuntabilitas pada lembaga Lembaga Pertahanan Negara ini salah satunya adalah mewujudkan profesionalisme kinerja yang ada didalamnya. Seyogyanya akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari apa yang dilakukan oleh aparat negara yang pada hakikatnya adalah agar terwujudnya integritas anggota yang kuat. Kondisi ini bukan tanpa alasan dimana selama ini banyak sekali pandangan miring yang muncul di masyarakat terkait integritas anggota kepolisian sehingga memunculkan stigma negatif di masyarakat maka dengan adanya akuntabilitas yang baik diharapkan stigma negatif masyarakat tersebut dapat hilang dan berubah menjadi pandangan positif.

Kondisi ini tentunya dirasakan betul oleh salah satu Lembaga Pertahanan Negara di wilayah Jawa Barat dimana akuntabilitas publik yang saat ini sedang digalakan menjadikan akuntabilitas publik yang baik menjadi salah satu skala prioritas yang harus dicapai oleh Lembaga Pertahanan Negara terutama dalam beberapa tahun belakangan ini khususnya dalam proses pengadaan sarana dan prasana di lingkungan Lembaga Pertahanan Negara itu sendiri dimana pada saat ini setiap pengadaan sarana dan prasarana selalu diupayakan agar

sesuai dengan akuntabilitas publik yang ditetapkan namun pada kondisi nyata hal tersebut masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan dimana dalam upaya meraih akuntabilitas publik yang baik kerap kali masih menemukan kendala-kendala dilapangan khususnya dalam proses pengajuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kerap kali terganggu dengan pelaporan kebutuhan sarana dan prasana yang kurang sesuai dengan kondisi riil sehingga menyulitkan pihak Lembaga Pertahanan Negara untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/2212/XI/2019 tanggal 14 November 2019, telah ditetapkan Biro Pengadaan Barang/Jasa Slog Polri dan telah diberlakukan melalui No 12 tahun 2013. Merupakan unsur pelaksana utama di bawah Aslog Kapolri yang bertugas membina dan mengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri. Jika mengacu pada peraturan tersebut seharusnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat diminimalisir dan menjadikan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan efisien sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan dalam akuntabilitas publik.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyempurnakan suatu sistem pengadaan barang dan jasa dengan cara sistem tender atau lelang yang sifatnya dilakukan secara elektronik hal ini merupakan bagian dari proses ketebukaan kepada publik sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dapat diakses dan diketahui oleh publik sehingga dapat terjamin tingkat efektifitas, efisiensi dan juga menghindari dari praktik-praktik kurang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa (Adiputra, Utama & Rossieta, 2018) oleh karena itu maka pemerintah mencoba menerapkan sebuah sistem baru yang dikenal dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin ketebukaan informasi publik yang dituangkan dalam Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun pada kenyataannya hal itu belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh Lembaga Pertahanan Negara dalam proses pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Lembaga Pertahanan Negara kerap kali menemui masalah terutama dalam sistem SPSE itu sendiri hal ini dikarenakan kondisi jaringan yang belum memadai memberikan kendala yang besar terhadap Lembaga Pertahanan Negara di Wilayah Jawa Barat dalam melakukan pengadaan sarana dan prasana yang dilakukan sehingga perlu ada upaya yang dilakukan khususnya dalam mengoptimalkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ini agar senantiasa dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mampu mewujudkan akuntabilitas publik yang sesuai. Dari paparan tersebut maka penting bagi Lembaga Pertahanan Negara di Wilayah Jawa Barat untuk mengoptimalkan penggunaan SPSE dalam meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana di organisasinya sehingga diharapkan dapat mewujudkan Profesionalisme kinerja.

## KAJIAN TEORI

### Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Kementerian Keuangan). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit. Di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, e-Procurement didefinisikan sebagai Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

## METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di salah satu Lembaga Pertahanan Negara di Wilayah Jawa Barat sebagai pengguna dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Agar memperoleh sampel yang representatif dari populasi, maka setiap subjek dalam populasi diupayakan untuk memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Adapun rumusan yang digunakan untuk mengukur sampel, digunakan rumus Slovin yaitu ukuran sampel yang merupakan perbandingan dari populasi dengan persentasi kelonggaran ketidaktelitian, karena dalam pengambilan sampel dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam pengambilan sampel ini digunakan taraf 10%, dan dalam menentukan ukuran sampel (n) dan populasi (N) yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + \left[ \frac{N \cdot e}{e} \right]^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

$e$  = Presentase kelonggaran penelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masi dapat ditolehir ( $e = 0, 10$ ).

Berdasarkan hasil dari perhitungan, maka jumlah sampel minimal yang diteliti adalah berjumlah 75 responden namun dikarenakan pada awal penelitian dibutuhkan responden sebanyak 15 responden maka sample yang diteliti untuk diolah adalah sebanyak 60 responden.

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisa dengan analisis SWOT. Analisis SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi factor-faktor yang menjadi kekuatan, kelamahan, peluang dan ancaman yang berpotensi muncul yang bisa menciptakan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat ditinjau dari berbagai sudut pandang baik secara internal maupun secara eksternal.

#### Strenght (S)

Yaitu analisis kekuatan, situasi ini merupakan kondisi dimana penulis akan memaparkan kekuatan-kekuatan yang muncul dari dalam organisasi dalam hal ini adalah keunggulan yang dimiliki terkait dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pengadaan sarana dan prasana di Lembaga Pertahanan Negara di Wilayah Jawa Barat dilihat dari factor internal.

#### Weaknesses (W)

Yaitu analisi kelemahan, situasi ini menggambarkan hal-hal yang menjadi kelemahan di yang barkaitan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pengadaan sarana dan prasana di Lembaga Pertahanan Negara di Wilayah Jawa Barat yang bersumber dari internal organisasi.

#### Opportunity (O)

Yaitu analisis peluang, dalam situasi ini penulis mencoba merumuskan beberapa pelung yang berpotensi muncul dan memberikan kesempatan bagi Lembaga Pertahanan Negara di Wilayah Jawa Barat untuk mencapai tujuannya.

#### Threats (T)

Yaitu analisis ancaman, situasi ini merupakan cara menganalisis potensi-potensi bahaya yang muncul yang dapat mengganggu akuntabilitas.

### **Konsep AHP (*Analytical Hierarchy Process*)**

Konsep *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan alat/tools untuk merumuskan strategi organisasi berdasarkan hasil analisa Internal melalui teknik IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta

analisa eksternal melalui teknik EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*Threats*), yang selanjutnya dilakukan teknik SFAS (*Strategic Factor Analysis Summary*) sebagai bahan pengambilan keputusan strategik. Sehingga dapat dilihat posisi organisasi terhadap permasalahan yang ditetapkan dalam program implementasi strategi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menguraikan langkah-langkah pemecahan masalah, naskah ini menggunakan pendekatan manajemen strategik dengan konsep analisa faktor strategi sebagai dasar penerapan konsep analytical hierarchy process (AHP) guna menentukan faktor strategi kunci sebagai alternatif pemecahan masalah sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel Internal Factors Analysis Summary (IFAS)

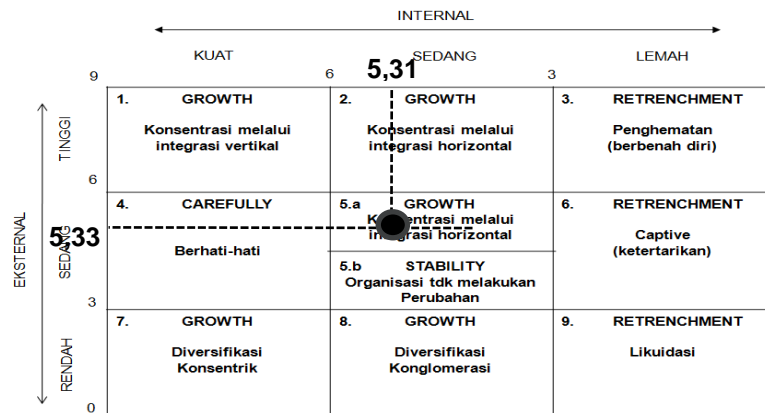
NO	KEY INTERNAL FACTORS	WEIGHT	RATING	WEIGHTED SCORE
<b>STRENGHT</b>				
1	KOMITMEN PIMPINAN	0.12	8	0.93
2	POKJA SOLID	0.09	6	0.52
3	TERSEDIANYA PERANGKAT KOMPUTER	0.10	7	0.73
4	MOTIVASI ANGGTA BAG SUMDA TINGGI	0.09	6	0.52
5	PENGAWASAN PIMPINAN KETAT	0.10	6	0.63
		0.50		3.34
<b>WEAKNESS</b>				
1	PERSONEL KURANG MENGUASAI IT	0.11	4	0.45
2	ANGGARAN MINIM	0.08	3	0.24
3	JARINGAN INTERNET MASIH LEMAH	0.13	5	0.63
4	PERS BAG SUMDA BLM SEMUA TERSERTIFIKASI	0.10	4	0.41
5	JUMLAH PERS KURANG	0.08	3	0.24
		0.50		1.97
	<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>		<b>5.31</b>

Tabel External Factors Analysis Strategic (EFAS)

NO	KEY EKSTERNAL FACTORS	WEIGHT	RATING	WEIGHTED SCORE
<b>OPPORTUNITY</b>				
1	ADANYA PERKAP NO.12 TAHUN 2013	0.08	6	0.51
2	PERKEMBANGAN SISTEM TERUS MENINGKAT	0.09	6	0.54
3	DUKUNGAN PEMDA	0.11	7	0.74
4	TREND PENGADAAN TERS MENINGKAT	0.12	8	0.93
5	ANTUSIASME PESERTA LELANG	0.10	7	0.72
		0.50		3.44

THREATS				
1	KOLUSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA	0.11	4	0.44
2	PEMAHAMAN PESERTA MINIM	0.08	3	0.25
3	KESIAPAN INFRASTRUKTUR.	0.09	3	0.28
4	PEMAHAMAN TEKNOLOGI MASYARAKAT RENDAH	0.07	3	0.22
5	POTENSI KECURANGAN MASIH TINGGI	0.14	5	0.69
		0.50		1.89
	<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>		<b>5.33</b>

Berdasarkan uraian tabel tersebut maka dapat diketahui skor nilai EFAS 5,33 dan IFAS 5,31 sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui posisi organisasi sebagai berikut:



Gambar 2 Kuadran Strategi

Dari kuadran tersebut maka posisi organisasi berada pada kuadran 5.a sehingga strategi yang digunakan adalah konsentrasi melalui integritas secara horizontal sebagai berikut:

**Strategi**

Strategi merupakan Langkah-langkah yang akan diambil oleh pimpinan dengan melihat factor internal dan eksternal yang dibangun dalam EFAS IFAS lalu merumuskan strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.

Berikut akan disajikan terlebih dahulu matrik EFAS IFAS sebagai Analisa penetapan strategi yang penulis lakukan. Maka dari itu strategi yang disampaikan berdasarkan analisa pada EFAS dan IFAS disajikan pada matrix SFAS dibawah ini:

Tabel 7 Matrix SFAS

NO	FAKTOR STRATEGI KUNCI	BOBOT	PERINGKAT	SKOR	JANGKA		
					PENDEK	SEDANG	PANJANG
A	MEMANTAPKAN KOMITMEN PIMPINAN	0.08	6	0.48	Red	Light Orange	Light Orange
B	TERSEDINYA PERANGKAT KOMPUTER	0.08	4	0.31	Red	Light Orange	Light Orange
C	SERTIFIKASI PERS BAG SUMDA	0.12	5	0.59	Yellow	Yellow	Light Orange
D	MENINGKATKAN PENGUASAAN IT	0.12	5	0.59	Yellow	Yellow	Light Orange
E	MENINGKATKAN JARINGAN INTERNET	0.07	4	0.28	Red	Light Orange	Light Orange
F	MENEKAN POTENSI KECURANGAN	0.09	4	0.36	Red	Light Orange	Light Orange
G	MENDAPAT DUKUNGAN PEMDA	0.11	7	0.74	Yellow	Yellow	Light Orange
H	OPTIMALKAN TREND PENGADAAN TERS MENINGKAT	0.13	8	1.05	Green	Green	Green
I	MENINGKATKAN ANTUSIASME PESERTA LELANG	0.12	5	0.61	Yellow	Yellow	Light Orange
J	MENEKAN KOLUSI PENGADAAN	0.09	4	0.36	Red	Light Orange	Light Orange

Strategi Jangka Pendek (0-3 bulan)

- 1) Memantapkan Komitmen Pimpinan
- 2) Tersedianya Perangkat Komputer
- 3) Meningkatkan Jaringan Internet
- 4) Menekan Potensi Kecurangan
- 5) Menekan Kolusi Pengadaan

Strategi Jangka Menengah (0-6 bulan)

- 1) Meningkatkan Penguasaan It Personel
- 2) Sertifikasi Pers Bag Sumda
- 3) Mendapat Dukungan Pemda
- 4) Meningkatkan Antusiasme Peserta Lelang



## Strategi Jangka Panjang (0-12 bulan)

- 1) Optimalkan Trend Pengadaan Ters Meningkat

### Action Plan

Berdasarkan strategi yang dirumuskan sebelumnya maka ada beberapa implementasi strategi yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Analisa EFAS IFAS sebelumnya maka penulis mencoba merumuskan action plan ini berdasarkan Analisa SWOT yang dilakukan dengan membagi 3 tahapan capaian yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang., yaitu:

## Strategi Jangka pendek (0 - 3 bulan)

- 1) Program : Memantapkan Komitmen Pimpinan

- a) Metode

(1) Penguatan Pimpinan, pimpinan memberikan paparan didepan anggota dan Jajaran tentang komitmen pimpinan dalam meningkatkan komitmen anggota.

- (2) Indikator Kinerja Program

- (1) Meningkatnya komitmen pimpinan

- 2). Program : Tersedianya Perangkat Komputer

- a) Metode :

(1) Pengadaan, pimpinan mengajukan penambahan perangkat komputer yang tersedia

- b) Indikator Kinerja Program

- (1) meningkatnya jumlah komputer yang tersedia

- 3). Program : Meningkatkan Jaringan Internet

- a) Metode :

(1) Upgrade, pimpinan melalui Bag Sumda mengajukan tambahan Bandwith internet

- b) Indikator Kinerja Program

- (1) Kecepatan internet meningkat

- 4). Program : Menekan Potensi Kecurangan

- a) metode :

(1) Riksa Dokumen, Dokumen dari peserta lelang diperiksa secara teliti

(2) Koordinasi, panitia lelang saling melakukan koordinasi terkait peserta lelang agar tidak ada kecurangan

b) Indikator Kinerja Program

(1) Validitas dokumen jelas

(2) Terjalin koordinasi panitia yang erat

5). Program : Menekan Kolusi Pengadaan

a) metode :

(1) Dokumentasi, melakukan dokumentasi yang benar dan lengkap.

b) Indikator Kinerja Program

(1) Data peserta lelang terungkap jelas

b. Strategi jangka sedang (0 bulan - 6 bulan)

Program : Meningkatkan penguasaan IT Personel

a) Metode

(1) Pelatihan, pimpinan memberikan pelatihan penggunaan IT bagi Personel

b) Indikator Kinerja Program

(1) Anggota lebih memahami tentang penggunaan IT dalam kegiatan operasional

2). Program : Sertifikasi Personel Bag Sumda

a) Metode

(1) Pendidikan, pimpinan merekomendasikan personel Bag Sumda agar mengikuti pendidikan dan ujian PPK.

b) Indikator Kinerja Program

(1) Anggota tersertifikasi bertambah

3). Program : Mendapatkan Dukungan Pemda

a) Metode

(1) Sosialisasi, pimpinan melakukan sosialisasi kepada pemda terkait kebutuhan sarana dan prasana

(2) Koordinasi, pimpinan melakukan koordinasi dengan pemda dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana

- b) Indikator Kinerja Program
  - o Dukungan Pemda meningkat
  - o Adanya hibah sarana dan prasarana
- c. Strategi jangka Panjang (0 bulan - 12 bulan)
  - 1) Program : Optimalkan Trend Pengadaan Terus Meningkatkan
    - a) Metode
      - (1) Swakelola, lembaga melakukan sendiri pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
    - b) Indikator Kinerja Program
      - (1) Pengadaan barang dan jasa secara penuh dikelola.

## **KESIMPULAN**

SDM dalam mengoptimalisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan melihat dua aspek utama secara kuantitas SDM yang ada di Bag Sumda masih berjumlah dibawah SDP yang dibutuhkan sehingga dalam hal ini kondisi SDM dalam mengoptimalisasi SPSE masih belum memadai. Secara kualitas SDM yang ada dalam Bag Sumda rata rata belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga secara kualitas SDM dalam pengadaan Sarpras masih belum memadai. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam mengoptimalikan pengelolaan anggaran yang tersedia masih belum maksimal sehingga pengelolaan dana masih belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Dalam mengoptimalisasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ada beberapa hal yang harus ditingkatkan seperti merekomendasikan kepada pimpinan melalui Bag SUMDA untuk meningkatkan jumlah personel yang tersedia. Merekomendasikan kepada pimpinan agar melaksanakan pendidikan dan pengembangan kepada anggota serta merekomendasikan anggota pada Bag Sumda agar mendapat sertifikat pengadaan barang dan jasa. Dalam mengoptimalisasikan pengelolaan anggaran yang tersedia Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

Merekomendasikan kepada pimpinan melalui Bag Ren agar menambah anggaran yang disediakan. Merekomendasikan kepada pimpinan melalui Bag Ren agar pengelolaan anggaran dilakukan secara elektronik melalui mekanisme sistem Slog.

## REFERENSI

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Brown, D. C., & Toze, S. (2017). Information governance in digitized public administration. *Canadian public administration*, 60(4), 581-604. <https://doi.org/10.1111/capa.12227>
- Halachmi, A., & Greiling, D. (2013). Transparency, e-government, and accountability: Some issues and considerations. *Public Performance & Management Review*, 36(4), 562-584.
- Lyrio, M. V. L., Lunkes, R. J., & Taliani, E. T. C. (2018). Thirty years of studies on transparency, accountability, and corruption in the public sector: The state of the art and opportunities for future research. *Public Integrity*, 20(5), 512-533. <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1416537>